

## Narsisme Agama dan Distorsi Ruang Publik: Analisis Perspektif Jürgen Habermas dalam Konteks Indonesia

Herrio Tekdi Nainggolan<sup>1\*</sup>, Andrianus Nababan<sup>2</sup>, Resmi Hutasoit<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Musamus

<sup>2</sup>Hoseo University, Republic of Korea

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Sentani

Korespondensi\*: [rionainggolan@unmus.ac.id](mailto:rionainggolan@unmus.ac.id)<sup>1</sup>

### Abstract

*This study aims to explore how religious narcissism shapes socio-religious behavioral patterns within society and to provide an overview of the expanding phenomenon through the relevance of Jürgen Habermas's public sphere theory in the Indonesian religious context. This research employs a qualitative method using a literature study approach supported by netnographic methods. The findings reveal that religious narcissism within the public sphere is manifested through the use of religious symbols, narratives, and performative practices in both social and digital spaces as instruments of image construction, identity legitimization, and contestation among religious groups. This phenomenon is influenced by identity politics, majority logic, and the legacy of religious conflicts, all of which contribute to the distortion of the public sphere as conceptualized by Habermas. Religious narcissism not only reinforces social polarization and religious exclusivism, but also weakens tolerance, intensifies intolerance, and hinders efforts toward religious moderation and social cohesion in Indonesia.*

**Keywords:** *public sphere; religious narcissism; socio-religious*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana narsisme agama membentuk pola perilaku sosial-keagamaan di masyarakat serta memberikan gambaran mengenai meluasnya fenomena tersebut ditinjau dari relevansi teori ruang publik Jürgen Habermas dalam konteks keagamaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang dibantu metode netnografi. Hasil analisis menunjukkan bahwa narsisme agama dalam ruang publik termanifestasi melalui penggunaan simbol, narasi, dan performativitas keagamaan di ruang sosial maupun digital sebagai sarana pencitraan, legitimasi identitas, serta kontestasi antar kelompok agama. Fenomena ini dipengaruhi oleh politik identitas, logika mayoritas, dan warisan konflik keagamaan yang kemudian mendorong distorsi ruang publik sebagaimana dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Narsisme agama tidak hanya memperkuat polarisasi sosial dan eksklusivisme keagamaan, tetapi juga berdampak pada melemahnya toleransi, meningkatnya intoleransi, serta terhambatnya upaya moderasi beragama dan kohesi sosial di Indonesia.

*Kata Kunci: narsisme agama; ruang publik; sosial-agama*



### Article History:

Received: 22 Mei 2025

Revised: 02 Mei 2026

Accepted: 05 Mei 2026

Published: 06 Mei 2026

## Pendahuluan

Fenomena narsisme agama di Indonesia menjadi isu yang menarik untuk ditulis ke dalam tulisan ilmiah. Istilah narsisme agama sendiri dapat diasosiasikan merujuk pada bentuk ekspresi keagamaan yang menekankan superioritas kelompok tertentu, sering kali bertujuan memamerkan identitas agama demi mendapatkan pengakuan atau legitimasi sosial (Lockhart et al., 2024; Rahman & Yudaningsih, 2025). Fenomena ini cukup populer dalam masyarakat Indonesia. Kelompok narsistik ini kerap memanfaatkan ruang publik, baik dalam bentuk fisik maupun digital, untuk memperkuat citra agama, sekaligus secara langsung atau tidak langsung mengeksklusi kelompok lain.

Bentuk dan pola narsisme agama ini pun dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk. Manifestasi seperti menampilkan simbol-simbol keagamaan di ruang publik hingga dalam bentuk bahasa verbal maupun non verbal bernuansa keagamaan di media sosial. Tindakan-tindakan sosial kemasyarakatan ini sering kali memicu perdebatan tentang batas kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap keberagaman dan pihak lain. Tindakan paling populer misalnya, penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam kampanye politik atau promosi kebijakan publik. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat di mana banyak kelompok agama yang berbeda yang saling berinteraksi dan bersosialisasi di ruang bersama, sehingga berpotensi mengancam kohesi sosial.

Agama sebagai entitas primordial berpotensi tampil fenomenal di Masyarakat (Weber, 2019). Pengaruh tampilan agama dalam ruang publik akan turut membentuk pola perilaku sosial-keagamaan masyarakat. Pengaruh ini tidak dapat dihindarkan, apakah pengaruh yang mempekerat atau membuat sekat-sekat sosial di masyarakat. Narsisme agama terjadi bukan saja dalam kehidupan dan interaksi secara fisik, tetapi juga menembus ruang maya. Dalam ruang maya, fenomena fanatisme agama secara terang-terangan terlihat di media sosial, baik konten berupa skrip, gambar, dan video maupun dalam bentuk narasi-narasi (Zuhri, 2021). Pun agama demikian strategis untuk dijadikan isu dalam ruang publik karena agama sangat kuat mempengaruhi berbagai aspek termasuk psikologi manusia (Rakhmat, 2003).

Untuk memahami dinamika tersebut, konsep ruang publik dari Jürgen Habermas menjadi relevan sebagai pisau analisis. Dalam pemikiran Habermas, ruang publik idealnya merupakan arena diskursus rasional yang memungkinkan partisipasi setara antar warga dalam membentuk opini publik melalui argumentasi yang bebas dari dominasi (Habermas, 1989). Namun, dalam realitas sosial kontemporer, ruang publik sering kali mengalami distorsi akibat hadirnya kepentingan, kekuasaan, serta dominasi kelompok tertentu. Dalam konteks ini, fenomena narsisme agama dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi ruang publik dari arena deliberatif menjadi ruang representasi simbolik dan kontestasi identitas.

Selain itu, hampir semua domain dimasuki oleh yang namanya agama. Agama masuk ke ranah publik dalam bidang ideologi, ekonomi, hukum, politik dan budaya masyarakat (Lubis, 2017). Dalam bidang ekonomi misalnya, agamapun dapat dijadikan sebagai komoditas untuk meraup keuntungan (Husna, 2018). Agama dijadikan ideologi demi keuntungan politis (Sari, 2016) dan dalam bidang hukum, agama dijadikan sebagai sumber pembenaran dan legitimasi terhadap tindakan melawan hukum (Kurniawan, 2018). Hal inilah yang menjadikan agama sebagai entitas yang amat strategis bagi masyarakat dan akan terus tetap menarik dan eksis ditampilkan dalam panggung publik.

Narsisme agama seakan sebuah pertunjukan dan ajang pameran dalam ruang publik dengan berbagai alasan dan maksud. Dapat dipahami bahwa kebebasan berpendapat, berekspresi dan berkarya memang adalah rohnya demokrasi. Tentu ruang publik merupakan milik bersama, milik kelompok manapun, termasuk kelompok agamis dan dapat diisi dengan berbagai warna dan ekspresi. Kelompok agamis mengisi ruang publik dengan

tampilan dan ekspresi agamis untuk menunjukkan eksistensi dari agamanya. Apakah kelompok agamis ini menyadari akan persepsi masyarakat, khususnya masyarakat yang berbeda kelompok, aliran, dan ideologi dengan mereka, bukanlah menjadi alasan penting bagi mereka. Narsisme agama dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk tujuan-tujuan yang mereka maksudkan. Narsisme agama membuat agama yang sejatinya adalah ranah privat, disorot ke ruang publik dan mengaburkan ruang nilai dan makna agama. Agama tidak lagi urusan privat saja tetapi juga menjadi urusan publik. Sebenarnya secara teoritis idealnya agama memang urusan privat, tetapi dalam kehidupan praktis, masyarakat agama dengan sikap narsistiknya gemar menyeret agama dan symbol-simbolnya ke ruang publik.

Pola perilaku keagamaan ini biasa dan menjadi budaya populer (Cartono, 2019). Hal ini terjadi karena memang tidak ada pemisahan secara tegas antara negara dan relasi antara negara dan agama sehingga keterhubungannya cukup kuat dalam berbagai aspek kehidupan publik. Negara tidak hanya berperan dalam mengatur kehidupan beragama, tetapi juga memberikan ruang yang luas bagi ekspresi keagamaan dalam ranah sosial dan politik. Kondisi ini menyebabkan agama memiliki posisi yang cukup strategis dalam mempengaruhi dinamika ruang publik dan kebijakan sosial.

Dalam praktiknya, sebagian kelompok keagamaan menampilkan ekspresi religius yang kuat di ruang publik sebagai bentuk afirmasi identitas dan kepentingan kelompok. Pada situasi tertentu, intensitas ekspresi tersebut dapat mempengaruhi posisi negara dalam menjaga prinsip netralitas terhadap keberagaman kelompok agama di masyarakat. Fenomena ini juga dapat berkembang menjadi bentuk fanatisme keagamaan yang berpotensi memunculkan ketegangan dengan kelompok masyarakat lain yang memiliki orientasi sosial dan pandangan keberagaman berbeda. Namun demikian, selama ekspresi dan gerakan keagamaan tersebut berlangsung secara damai, tidak mengandung kekerasan, serta tidak mengganggu ketertiban umum, keberadaannya dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika masyarakat demokratis yang memberi ruang bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat (Zendrato, 2024).

Penelitian tentang narsisme agama di Indonesia masih relatif terbatas didominasi dalam ranah psikologi umum. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pengaruh narsisme dan moderasi religiusitas terhadap perilaku di media sosial (Sanjaya, 2020), pengaruh fundamentalisme agama terhadap narsisme mahasiswa (Budiarti & Ardi, 2020), perilaku narsisme dalam beragama dalam riwayat kenabian (Maemunah & Muzakki, 2024), serta fenomena narsistik beragama di media sosial (Silalahi et al., 2023). Kajian terdahulu dilakukan lebih berfokus pada pengaruh narsisme terhadap perilaku di media sosial, bagaimana pengaruh fundamentalisme agama bagi perilaku narsistik serta pandangan teologi Kristen terhadap narsisme agama. Dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, belum ada yang mengkaji narsisme agama sebagai fenomena sosial yang berlangsung dalam ruang publik, terutama dalam kaitannya dengan komunikasi, relasi kuasa, dan pembentukan opini publik di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis fenomena narsisme agama melalui perspektif Jürgen Habermas, khususnya konsep ruang publik, untuk memahami bagaimana ekspresi keagamaan digunakan dalam dinamika sosial, politik, dan diskursus publik di konteks Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan fenomena narsisme agama tidak hanya sebagai ekspresi keagamaan di ruang digital, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berlangsung dalam ruang publik secara riil di Indonesia. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek psikologis atau perilaku di media sosial, penelitian ini menganalisis narsisme agama dalam kaitannya dengan dinamika ruang publik menggunakan perspektif Jürgen Habermas. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti

bagaimana ekspresi simbolik keagamaan, logika mayoritas, dan memori konflik antaragama berkontribusi terhadap terbentuknya pola relasi sosial-keagamaan serta dampaknya terhadap kohesi sosial masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana narsisme agama di ruang publik membentuk pola perilaku sosial-keagamaan masyarakat serta dampaknya terhadap kehidupan sosial-keagamaan di Indonesia. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: (1) bagaimana fenomena narsisme agama termanifestasi dalam ruang publik; (2) bagaimana fenomena tersebut berkaitan dengan dinamika dominasi dan kontestasi antar kelompok keagamaan; serta (3) bagaimana implikasinya terhadap kohesi sosial masyarakat. Argumentasi utama dalam tulisan ini adalah bahwa narsisme agama berpotensi mendorong disintegrasi sosial, yang ditandai oleh meningkatnya intoleransi, eksklusivitas sosial, serta tantangan terhadap upaya moderasi beragama di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka sebagai metode utama (Moleong, 2018), dan untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga memanfaatkan data observasi terbatas pada fenomena perilaku performativitas religius masyarakat dalam ruang digital (netnografis) sebagai ilustrasi empiris (Tsuria et al., 2017). Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan yang dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah dan dari buku-buku yang memuat data dan informasi tentang topik penelitian (Fadli, 2021). Dengan memperhatikan data secara komprehensif, hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk naratif-deskriptif menggunakan analisis induktif. Dalam tulisan ini fakta fenomena narsisme agama disajikan dalam bentuk tulisan fakta ilmiah. Data dan fakta berupa fenomena sosial keagamaan dalam masyarakat dianalisis dengan mengacu pada teori ruang publik Jurgen Habermas. Kemudian hasil analisis data dan fakta disajikan dalam bentuk poin-poin argumentasi sebagai temuan untuk menarik kesimpulan. Maka dengan menyajikan data dan menganalisisnya, metode ini dari perspektif sosiologi agama digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika narsisme agama dalam ruang publik Indonesia, khususnya dalam melihat bagaimana ekspresi religius, identitas keagamaan, dan praktik performatif masyarakat diproduksi serta dipertontonkan dalam ruang sosial digital maupun kehidupan publik kontemporer.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Problematika Agama dalam Ruang Publik***

Agama sebagai entitas primordial sejatinya merupakan ranah yang amat privat karena ia berurusan dengan yang Ilahiah, yang metafisik dan menyentuh kedalaman batin pemeluknya. Namun, dalam sejarahnya, agama justru tampil begitu dominan di ruang publik untuk mengurus urusan publik yang lebih mengganggu substansi relasi kemanusiaan. Agama tampil di ruang publik pada kenyataannya sebagai penggerak untuk melegitimasi aksi-aksi anti sosial dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Maka tidak jarang agama di ruang publik tampil sebagai sumber antisosial.

Ruang publik merupakan ruang bersama, milik bersama untuk diisi dengan tindakan-tindakan rasional. Tindakan sosial yang rasional lah yang patut dilakukan di ruang publik. Dalam panggung demokrasi, ruang publik tidak boleh diisi dengan hal-hal yang dapat merendahkan hak dan martabat manusia, mengumbar kebencian atas nama apapun kepada orang lain, serta perilaku-perilaku yang dapat mengganggu pihak lain (Prasetyo, 2012). Tetapi faktanya, ruang publik sebagai panggung demokrasi justru digunakan sebagai pertunjukan egosentrisme, dan eksklusivisme akibat fiksasi agama yang berlebihan. Agama

sebagai sumber perdamaian dan nilai-nilai humanisme justru dihadirkan dalam tampilan yang lain. Agama tampil sebagai sumber kekerasan, kejahatan serta yang membahayakan relasi sosial di masyarakat. Mengapa agama yang kita tahu adalah sumber perdamaian dan penuh dengan ajaran untuk memuliakan kemanusiaan, justru tampil beringas dan menakutkan? Apakah kita masih dapat mengakui agama sebagai sumber pengajaran dan pemuliaan kemanusiaan yang relevan dalam sistem negara demokrasi? Mengapa negara cenderung tidak berdaya ketika berhadapan dengan kekerasan atas nama agama? Pertanyaan-pertanyaan ini menggambarkan realitas tampilan agama di ruang publik. Ibarat dua sisi koin, agama menampilkan dua wajah yang berlainan. Pada satu sisi agama hadir dalam tampilan pembawa damai dan sumber kebajikan serta menekankan penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Namun, di sisi yang lain, agama juga ditampilkan sebagai sumber kekerasan dan konflik di masyarakat (Haryatmoko, 2010). Inilah realitas tampilan dari agama dalam ruang public di Indonesia.

Atas kenyataan tersebut di atas, tentu kita tidak menolak agama dengan segala eksistensinya dalam ruang publik. Agama tetap memiliki nilai dan fungsi sosial bagi kehidupan bermasyarakat dalam ruang publik. Fungsi sosial konstruktif dari agama sangat berperan dalam masyarakat untuk menunjang cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia sebagai bangsa beragama dan bukan negara sekuler merupakan keputusan final yang telah diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pancasila sila pertama (Abdullah, 2017). Namun, perlu dipikirkan dan disadari oleh seluruh lapisan masyarakat dalam konteks bernegara, bagaimana menempatkan dan memposisikan agama di ruang publik (Prasutomo, Wijaya & Weismann, 2019).

Dalam hal ini Jürgen Habermas, memberikan kontribusi teori ruang publik untuk melihat permasalahan ini. Dalam konteks masyarakat Eropa yang sekuler, Habermas memberikan opsi untuk melihat relasi agama dengan negara. Habermas menjelaskan dalam negara terdapat masyarakat religius yang sangat kuat memposisikan peran (Madung, 2011). Oleh karena itu, maka perlu adanya diskursus agama untuk mengatasi sistem nilai yang dianut antara masyarakat religius dan masyarakat sekuler. Menurut Habermas, tanpa diskursus agama, kelompok masyarakat yang religius ini berpotensi mengembangkan hal-hal yang destruktif dari agamanya (Kleden, 2010). Dengan demikian, berarti agama dapat mengkomunikasikan nilai-nilai positif konstruktif di ruang publik. Diskursus agama dilakukan dengan membuka cakrawala berpikir bagaimana seharusnya agama menyampaikan nilai-nilai agama secara adil dan arif pada masyarakat luas yang plural (Gunawan & Bangun, 2019).

Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai sebuah arena diskursif tempat individu dapat saling bertukar ide dan pandangan tanpa adanya dominasi kekuasaan, dengan tujuan untuk mencapai konsensus yang rasional dan universal. Bagi Habermas, ruang publik yang ideal bersifat inklusif, terbuka, dan bebas dari kepentingan maupun dominasi domain apapun (Habermas, 2010). Habermas menganggap ruang publik sebagai tempat diskusi rasional yang bebas dari dominasi kelompok masyarakat tertentu, apakah masyarakat golongan mayoritas, atau atas nama apapun bahkan negara (Hardiman, 2010). Namun, dalam konteks modern, ruang publik mengalami transformasi akibat globalisasi, komersialisasi, dan perkembangan teknologi informasi. Media sosial, misalnya, telah menjadi salah satu ruang publik terbesar saat ini, menggantikan ruang-ruang fisik seperti forum diskusi, kafe, atau media cetak. Dalam ruang publik digital ini, narasi-narasi keagamaan sering muncul dengan berbagai tujuan, termasuk untuk menegaskan identitas, mencari pengakuan, atau bahkan memperkuat polarisasi sosial. Fenomena narsisme agama di ruang publik di era modern ini berkaitan dengan cara individu atau kelompok menggunakan simbol dan praktik keagamaan untuk menunjukkan superioritas moral,

kebenaran eksklusif, atau status sosial mereka, di mana agama memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara beragama dan bukan negara sekuler murni, agama memiliki peran dan kontribusi yang cukup strategis. Sumber hukum dan landasan hukum dirumuskan dengan mengadopsi nilai-nilai agama. Maka dalam konteks Indonesia, agama bukan hanya sebagai perilaku kebudayaan tetapi agama sebagai sumber dan sistem nilai masyarakat. Dalam pada itu, agama semakin memiliki ruang dan tempat bagi kehidupan bermasyarakat. Mustahil memprivatisasi agama di negara Indonesia yang amat religius. Tentu hal ini bukan masalah, jikalau seluruh lapisan masyarakat sadar akan kepelbagaian agama yang ada.

Menurut penulis, dalam konteks Indonesia, diskursus agama dapat diterjemahkan dengan memposisikan semua agama yang diakui negara pada prinsip keadilan. Negara berupaya sekuatnya untuk tidak diskriminatif terhadap agama minoritas atau agama yang dianggap "subordinatif". Negara tidak boleh kalah dengan tekanan massa dan "preman agama" atau karena kepentingan tertentu. Demikian juga dalam pemberlakuan hukum, semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama. Pemberlakuan hukum yang diskriminatif, seperti penerapan Undang-Undang Penodaan Agama, Surat Keterangan Bersama Tiga Menteri kontra terhadap diskursus agama. Jadi, dalam konteks Indonesia agama memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis di ruang publik, sehingga negara perlu untuk berlaku adil bagi seluruh agama sebagaimana diskursus agama yang dimaksudkan oleh Habermas.

### ***Ekspresi Keagamaan sebagai Kontestasi Ruang Publik di Indonesia***

Narsisme agama di ruang publik kian marak di berbagai kota di Indonesia. Fenomena ini berkorelasi dengan faktor lain yang melatar belakangnya. Salah satu faktor yang amat kuat melatarbelakangnya adalah faktor politik. Pada pemilu DKI 2017 lalu menjadi salah satu contoh faktor politik yang menyebabkan maraknya narsisme agama di Indonesia. Politik identitas agama yang dimainkan pada kontestasi pemilu DKI secara langsung menyiratkan power agama yang ingin ditunjukkan. Setelah selesainya pemilu DKI dengan demo 212, aksi-aksi lain sebagai aksi lanjutan pun diinspirasi dari peristiwa tersebut. Bahkan, aksi itu tidak hanya berurusan untuk kepentingan politik, tetapi juga merambah pada aspek lain. Misalnya, munculnya minimarket 121 Mart di beberapa kota di Indonesia, dengan label peningkatan ekonomi syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Destarini dan Prambudi mengungkap fakta, harga bukanlah menjadi faktor bagi pembeli, dalam hal ini yang menjadi target pembeli adalah yang beragama Islam untuk berbelanja di 121, tetapi rasa kecintaan dan pembelaan terhadap agama Islam (Destarini & Prambudi, 2020). Tetapi pada kenyataannya minat masyarakat muslim untuk membeli dan berbelanja di minimarket 212 Mart cukup rendah dan kini tidak mengalami perkembangan. Dari perspektif Sosiologi Agama, hal ini merupakan narsisme agama/gerakan keagamaan dengan motif ekonomi.

Fenomena narsisme agama lainnya yang dapat ditelisik adalah sekelompok warga mengaji di alun-alun kota Jogja pada 02 April 2022. Media Online Harianjogja mencatat, peserta mengaji di Malioboro lebih dari 1000 orang dan menjadi viral di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Kegiatan itu direncanakan dan dikoordinir dan pihak penyelenggara mengatakan memang tujuan mereka supaya menjadi viral dengan maksud supaya umat muslim kembali membaca Al Quran. Kegiatan itu dimotori oleh Badan Wakaf Al Quran Jogja, dan alasan penyelenggara memilih kawasan Malioboro sebagai tempat mengaji karena kawasan itu cukup memiliki *Branding* (Sunartono, 2022). Dari peristiwa ini kita mengetahui bahwa kelompok ini ingin menampilkan simbol-simbol agama di tempat umum, di mana berbagai kelompok dan golongan ada di tempat tersebut. Malioboro sebagai kawasan ramai dipilih sebagai tempat dan ruang untuk menunjukkan simbol-simbol agama

untuk mendapatkan perhatian tanpa mempertimbangkan etika publik berkaitan dengan kenyamanan pihak lain.

Gerakan-gerakan mengaji di pusat-pusat kota lainnya juga terjadi, seperti di kota Bogor (Firmansyah, 2023), Klaten, Depok, Kota Batu dan beberapa kota di Indonesia yang terjadi secara masif dan dengan pola yang sama (Rizki, 2022). Narsisme agama semacam ini terjadi berulang dan seperti musiman dan dilakukan di pusat-pusat kota yang nota bene adalah tempat dan ruang aktivitas dan ekspresi semua golongan. Narsisme agama semacam ini merupakan ekspresi religius yang berlebihan dengan cara pamer dan menonjolkan simbol-simbol agama pada kelompok yang berbeda.

Fenomena narsisme agama juga terjadi dalam agama Kristen. Narsisme agama dalam agama Kristen dilakukan oleh gereja sebagai lembaga maupun orang secara personal. Aktivitas-aktivitas keagamaan seperti ibadah KKR, khotbah, motivasi rohani, seminar rohani dan apologet dengan sengaja dipublikasi di berbagai *platform* media sosial dengan tujuan menarik perhatian masyarakat luas. Sesaat sepertinya hal-hal ini dilakukan hanya sebagai bagian dari ajaran agama Kristen yang tidak ada salahnya karena tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Namun, disadari ataupun tidak, konten-konten tersebut menimbulkan polemik dan perdebatan yang dapat memicu kebencian antar kelompok. Kelompok Kristen agamis ini mengira mereka melakukannya untuk tujuan misi dan menyebarkan ajaran kekristenan, tanpa mengetahui konteks misi yang beretika. Bentuk narsisme agama yang lain dilakukan secara personal adalah melakukan *livestreaming* di media sosial ketika sedang berlangsung ibadah di gereja. Hal semacam ini kerap kali dilakukan dan seolah kebiasaan yang dibenarkan, padahal dari perspektif teologi Kristen, hal ini tidaklah dibenarkan, karena mengganggu kekhusyukan ibadah dan mengganggu fokus orang lain.

Citra religius yang dikonstruksi dan dibangun melalui narsisme agama malah cenderung mengarah pada konsekuensi destruktif. Mereka yang narsis agama ini mencitrakan diri lebih saleh, paling benar, paling layak selamat sehingga mengarah pada fanatisme agama yang radikal dan intoleran kepada pihak lain (Silalahi & Marbun, 2023). Mereka yang narsis agama ini menjadi *overload*, mengait-ngaitkan segala sesuatu dengan bahasa agama, reaktif dan sensitif, mudah menyesatkan/membidatkan dan mengkafirkan pihak lain di luar golongannya.

Fenomena aktivitas keagamaan yang dipertontonkan melalui berbagai video di media sosial seperti *YouTube*, menunjukkan bagaimana ruang publik digital mengalami transformasi menjadi arena representasi simbolik keagamaan. Tayangan yang memperlihatkan sekelompok masyarakat melakukan aktivitas mengaji di ruang-ruang umum dari berbagai kelompok usia tidak lagi sekadar menjadi ekspresi religius personal, melainkan telah memasuki wilayah komunikasi publik yang terbuka terhadap respons, penilaian, dan kontestasi masyarakat luas. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai komentar warganet, baik yang mendukung maupun yang menolak aktivitas tersebut.

Dalam kerangka Habermas, ruang publik idealnya menjadi arena diskursus rasional yang memungkinkan warga berdialog secara setara demi membangun kepentingan bersama. Namun, ketika ekspresi keagamaan ditampilkan secara demonstratif tanpa mempertimbangkan etika publik maupun keteraturan sosial, ruang publik berpotensi mengalami distorsi komunikasi. Aktivitas keagamaan yang dilakukan tanpa izin di ruang umum dapat dipahami bukan hanya sebagai praktik religius, tetapi juga sebagai bentuk performativitas identitas yang bertujuan memperoleh pengakuan sosial, menarik perhatian publik, atau memperlihatkan eksistensi kelompok tertentu (Habermas, 1989). Dengan demikian, praktik tersebut mencerminkan gejala narsisme agama dalam ruang publik, yakni ketika simbol dan aktivitas keagamaan dipertontonkan sebagai sarana pencitraan dan afirmasi identitas kolektif. Dalam konteks ini, agama tidak lagi hadir terutama sebagai media

refleksi spiritual, tetapi tampil sebagai instrumen representasi sosial yang mengarah pada pertunjukan “power agama” di hadapan publik.

### ***Warisan Konflik ke Narsisme Agama: Polarisasi Identitas dan Krisis Ruang Publik***

Sejarah mencatat bahwa konflik di dunia, seperti perang Salib (1096-1271 M) antara umat Islam dan Kristen di Eropa, merupakan salah satu konflik paling berat dan berlangsung paling lama di abad pertengahan. Namun, dalam konteks masa kini, justru invasi negara-negara Barat (seperti Amerika dan sekutunya) terhadap negara-negara berkembang telah memunculkan konflik baru di era modern. Sejarah perjumpaan agama-agama di Indonesia diwarnai dengan intrik dan dinamika. Perjumpaan itu menyisakan konflik dan ketegangan sosial, tetapi juga ada relasi damai dan persahabatan. Stereotip negatif terhadap kelompok yang berbeda agama sering menjadi pemicu konflik antarumat beragama di Indonesia. Hal ini bahkan sampai pada aksi saling serang, fitnah, narasi-narasi kebencian serta penghancuran rumah ibadah dan tempat-tempat yang dianggap sakral bagi masing-masing kelompok agama (Yunus, 2014).

Dalam beberapa dekade dewasa ini misalnya, kelompok masyarakat mudah tersulut emosinya karena kurangnya pemahaman dan literasi keagamaan. Umat Islam sering diberi label sebagai kelompok radikal, intoleran, memiliki sikap fanatisme keagamaan yang berlebihan. Pandangan yang demikian jelas merupakan sangat subjektif dalam memandang perilaku dan kebenaran agama. Sementara itu, umat Kristen kerap dianggap invansif, punya keinginan menghegemoni, ambisius dan merasa memiliki power untuk menguasai berbagai aspek kehidupan dan menyebarkan ajaran kekristenan.

Masih segar di ingatan kita contoh konkret konflik agama yang begitu mencekam dan menimbulkan trauma bagi bangsa ini adalah konflik Ambon dan Poso (Hasrullah, 2009). Berbagai upaya pun dilakukan demi meredam kekerasan atas nama agama dan mendorong integrasi sosial (Anshori, 2012), dilakukan oleh pemerintah (Taufiq & Alkholid, 2021), lembaga agama maupun secara personal yang prihatin terhadap situasi relasi agama di Indonesia. Apa yang terjadi hari ini merupakan bagian dari pengaruh rentetan peristiwa di masa lalu, termasuk ketegangan dan stigma negatif terhadap agama hari ini. Konflik agama di masa lalu meskipun tidak secara langsung dirasakan oleh umat beragama hari ini, secara psikologis seakan melibatkan mereka dalam konflik itu.

Narsisme agama hari ini dapat dikatakan sebagai bentuk kontestasi dan reaksi terhadap stigma dan sejarah konflik agama masa lalu. Meningkatnya disintegrasi sosial akibat konflik agama mengindikasikan bahwa rasa kemanusiaan dan kesatuan bangsa kita sedang terancam di tengah perdaban yang semakin individualis. Agama dijadikan sebagai media persaingan dan kontestasi untuk menghegemoni yang lain. Agama mengaburkan manusia dari kemanusiaannya sehingga ketegangan sosial tidak dapat dihindarkan. Situasi ini amat memprihatinkan jika diperhadapkan dengan substansi agama itu sendiri. Agama yang satu melihat agama yang lain sebagai lawan yang harus dikalahkan. Konsep dan terminologi mayoritas-minoritas dimaknai sebagai kemampuan dan eksistensi agama untuk mengintimidasi dan mendiskriminasi.

Hari ini stigma mengenai agama Kristen sebagai agama kolonial dan agama penindas masih tetap dinarasikan (Widjaja, 2019). Sebaliknya, agama Islam dilabeli sebagai agama yang memproduksi serta mendukung terorisme atas nama jihad. Ketegangan-ketegangan antar pemeluk agama yang demikian adalah ancaman yang amat serius bagi bangsa dan bagi persoalan kemanusiaan hari ini. Narsisme agama di ruang publik sedang dimainkan untuk menunjukkan bahwa agama yang satu adalah agama yang paling benar, paling kuat, paling banyak pemeluknya dan agama yang paling cocok untuk diyakini, alih-alih memberi tameng agama yang lain buruk dan tidak membawa keselamatan. Pengaruh

narsisme agama di ruang publik ini membuat pemeluknya yang tidak mampu berpikir kritis, menjadi tidak otonom dalam keyakinannya.

Fenomena narsisme agama macam ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi keberagamaan dari ruang refleksi personal menuju arena kontestasi identitas dalam ruang publik. Ekspresi keagamaan tidak lagi diarahkan terutama pada pembentukan kesadaran moral dan komunikasi etis, melainkan cenderung digunakan untuk mempertahankan dominasi simbolik kelompok di tengah masyarakat plural. Kondisi ini tampak ketika perkembangan kelompok agama lain dipersepsikan sebagai ancaman terhadap eksistensi kelompok sendiri, sehingga ruang publik dipenuhi oleh upaya-upaya afirmasi identitas dan kompetisi simbolik antaragama. Dalam situasi demikian, perpindahan agama maupun pertumbuhan jumlah pemeluk agama tertentu tidak lagi dipahami sebagai pilihan personal dalam ruang privat, tetapi berubah menjadi isu publik yang dipertontonkan sebagai indikator superioritas dan kekuatan kelompok agama tertentu. Habermas melihat bahwa ruang publik ideal seharusnya menjadi arena komunikasi rasional yang memungkinkan warga berdialog secara setara tanpa dominasi dan tekanan identitas (Habermas, 1984). Namun, ketika agama dipolitisasi dan dijadikan instrumen legitimasi sosial maupun kekuasaan, komunikasi publik mengalami distorsi karena orientasi dialogis digantikan oleh kepentingan representasi dan hegemoni simbolik.

Warisan konflik agama masa lalu berdampak dan masih tersisa secara nyata hingga kini. Paling nyata adalah masih banyak baik penganut agama Kristen maupun penganut agama Islam secara psikologis menganggap sejarah konflik agama masa lalu adalah beban dan tanggungan yang belum selesai. Akibatnya, stigma itu masih saja menjadi masalah nasional bagi negara Indonesia, yang memang menjadi sangat kompleks, karena disusupi oleh kepentingan-kepentingan lain terlebih kepentingan politik. Hal ini diperparah karena Stigma terhadap kelompok agama tertentu seringkali diperkuat oleh narasi sejarah yang bias, pemberitaan media yang tidak berimbang, dan penguatan narasi politik identitas. Hingga kini, secara terang-terangan sebagian umat Islam di beberapa daerah masih memandang Kristen sebagai "ancaman," dengan tuduhan-tuduhan kristenisasi. Sementara itu, umat Kristen sering merasa termarginalkan dalam kebijakan negara dalam menjalankan hak-haknya untuk bebas menjalankan agama, bahkan terkadang dengan sengaja dibatasi oleh aparaturnegara (Samosir et al., 2022).

Realitas sosial keagamaan tersebut menunjukkan bahwa agama dalam masyarakat modern tidak lagi hadir semata sebagai sumber nilai etis dan solidaritas sosial, tetapi juga mengalami komodifikasi dalam berbagai kepentingan sosial dan politik. Dalam konteks ini, makna agama terus dinegosiasikan di ruang publik melalui media, politik identitas, dan persaingan antar kelompok, sehingga agama kehilangan dimensi reflektifnya dan cenderung tampil kontradiktif terhadap klaim universalnya sebagai sumber kebenaran, kedamaian, dan kemanusiaan (Campbell, 2005).

### ***Narsisme Agama, Polarisasi Politik, dan Distorsi Ruang Publik***

Secara konseptual, narsisme agama dapat dilihat sebagai upaya individu atau kelompok untuk menonjolkan klaim moral, kebenaran eksklusif, dan superioritas simbolik melalui praktik keagamaan. Ketika hal ini berhubungan dengan politik, narsisme agama sering digunakan untuk mempertegas batas antara kelompok yang dianggap "kami" dan "mereka," yang pada akhirnya memperburuk segregasi sosial. Polarisasi ini tidak hanya menciptakan jarak antara kelompok-kelompok yang berbeda, tetapi juga memperdalam ketegangan yang muncul akibat perbedaan ideologi, budaya, dan kepentingan ekonomi (Zaluchu, et. al., 2019).

Contoh nyata dari fenomena ini adalah penggunaan agama dalam kampanye politik, terutama dalam pemilu. Calon politisi sering memanfaatkan simbol agama atau bahkan

menciptakan stigma terhadap lawan politik dengan menyoroti perbedaan keyakinan agama. Praktik ini tidak hanya memicu ketegangan antarumat beragama, tetapi juga antara sesama pemeluk agama yang memiliki pandangan politik berbeda. Dalam hal ini, narsisme agama berfungsi sebagai bentuk manipulasi yang mengabaikan prinsip inklusivitas dan keberagaman yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif teori ruang publik Jürgen Habermas, fenomena narsisme agama dalam politik dapat dipahami sebagai bentuk kolonisasi ruang publik oleh kepentingan identitas keagamaan tertentu. Ruang publik yang idealnya menjadi arena dialog rasional dan deliberatif justru berubah menjadi ruang afirmasi simbolik yang digunakan untuk menampilkan superioritas moral kelompok agama tertentu. Kondisi ini tampak ketika interpretasi agama tertentu didorong masuk ke dalam kebijakan publik melalui narasi moral yang bersifat eksklusif dan hegemoni (Habermas, 1989). Situasi tersebut menunjukkan bahwa praktik narsisme agama dalam politik bukan hanya memunculkan ketegangan sosial, tetapi juga menggeser fungsi agama dari sumber etika sosial menuju alat mobilisasi kekuasaan. Agama tidak lagi hadir sebagai medium integrasi sosial sebagaimana yang diidealkan dalam ruang publik deliberatif, melainkan sebagai instrumen politik yang memperkuat polarisasi dan relasi dominatif antarkelompok masyarakat.

Media sosial menjadi salah satu arena penting bagi ekspresi narsisme agama yang berorientasi politis. Di berbagai *platform digital*, individu dan kelompok tertentu dapat menyebarkan narasi keagamaan yang sering kali bersifat provokatif dan memecah belah. Kampanye berbasis agama di media sosial memanfaatkan simbol-simbol religius untuk menciptakan kesan autentisitas dan moralitas, sementara pihak yang menentang narasi tersebut juga menggunakan media sosial sebagai ruang untuk menyuarakan kritik, yang berujung pada munculnya konflik baru di ruang publik digital (Ardha, 2014). Kondisi ini menggambarkan bahwa narsisme agama telah melampaui ruang fisik dan merambah polarisasi politik secara virtual (Epafras et al., 2022). Oleh politik oportunistik, domain agama dijadikan sebagai alat politik yang justru merusak integrasi nasional (Syarif, 2019). Walaupun agama memainkan peran penting dalam membentuk moralitas dan etika publik, penyalahgunaan agama untuk tujuan politik sering kali berujung pada eksploitasi kekuasaan. Para pemimpin politik yang memanfaatkan agama demi kepentingan pribadi sering mengabaikan nilai-nilai universal yang seharusnya menjadi inti ajaran agama, seperti keadilan dan solidaritas. Sebaliknya, mereka fokus pada pemanfaatan emosi religius untuk mendapatkan dukungan politik, yang hanya memperburuk perpecahan dalam masyarakat (Zaluchu, et.al., 2019).

Mengatasi polarisasi yang disebabkan oleh narsisme agama dalam politik memerlukan pendekatan holistik. Pendidikan agama yang inklusif dan moderat harus menjadi prioritas, terutama dalam sistem pendidikan formal. Dengan pemahaman agama yang lebih luas dan mendalam, masyarakat dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan menanggulangi manipulasi politik berbasis agama (Syarif, 2019). Media juga memegang peranan penting dalam mengurangi polarisasi ini dengan menyajikan informasi yang berimbang dan menghindari penyebaran narasi yang dapat memecah belah masyarakat. Pada akhirnya, mengatasi narsisme agama dalam politik memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk pemimpin agama, politisi, dan masyarakat sipil. Dengan kerjasama yang kuat, Indonesia dapat menciptakan ruang publik yang lebih inklusif, di mana agama tidak lagi menjadi alat polarisasi, tetapi menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan keadilan, kedamaian, dan persatuan. Ini sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara.

***Narsisme Agama, Eksklusivisme, dan Erosi Toleransi dalam Ruang Publik***

Polarisasi akibat narsisme agama sering kali menciptakan ketidakharmonisan, bahkan tindakan-tindakan diskriminatif, perundungan, dan kekerasan fisik terhadap kelompok yang lain apalagi kaum minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa narsisme agama tidak hanya menjadi alat politik, tetapi juga ancaman terhadap persatuan dan integrasi sosial. Narsisme agama dapat menjadi sebuah faktor yang kontraproduktif terhadap toleransi agama. Hal ini merujuk pada sikap atau perilaku di mana seseorang atau kelompok merasa bahwa keyakinan agama mereka adalah yang paling benar, dan mereka merasa lebih unggul daripada keyakinan agama lainnya. Perilaku demikian merupakan tindakan anti sosial bagi orang lain apalagi ketika dilakukan di ruang publik. Hal ini mengindikasikan ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk menerima atau menghormati keyakinan agama orang lain, yang pada gilirannya dapat menghambat toleransi agama.

Dalam perspektif sosiologi agama, sebagian bentuk narsisme agama dapat dipahami sebagai kecenderungan eksklusivisme identitas keagamaan yang berpotensi menghambat berkembangnya sikap toleransi antarumat beragama. Kecenderungan tersebut tercermin dalam pola keberagamaan yang menempatkan keyakinan kelompok sendiri sebagai pusat kebenaran, sehingga ruang untuk memahami perspektif dan pengalaman keagamaan kelompok lain menjadi semakin terbatas (Ridwan, 2016). Dalam situasi tertentu, individu maupun kelompok dengan orientasi keberagamaan yang sangat eksklusif cenderung lebih sulit membangun dialog yang terbuka terhadap perbedaan keyakinan (Hanafi, 2017).

Erich Fromm memperkuat kesimpulan itu dengan menyatakan bahwa perilaku narsistik mengembalikan kesenangan untuk dirinya dan mengabaikan yang lain. Selain itu, narsisme agama juga dapat mengganggu dialog dan kerjasama antaragama. Toleransi agama membutuhkan dialog yang terbuka, saling pengertian, dan kerjasama antaragama (Harold, 1989). Narsisme agama dapat mengganggu proses ini dengan menciptakan ketegangan dan mispersepsi antar kelompok agama. Dalam konteks ruang publik, fenomena ini menunjukkan bahwa ekspresi identitas keagamaan yang terlalu menonjol dan eksklusif dapat mempengaruhi kualitas komunikasi sosial, terutama ketika perbedaan keyakinan tidak lagi dipahami sebagai bagian dari realitas sosial yang harus dikelola secara dialogis dan inklusif.

Sikap toleransi didasarkan pada penerimaan pada keragaman keyakinan dan penghormatan terhadap perbedaan keagamaan. Penghargaan yang dimaksud adalah penerimaan bagi orang lain untuk mempraktikkan dan menyatakan keyakinan agama yang lain tanpa tekanan dari pihak lain. Narsisme agama sebagai tampilan sikap yang menonjolkan keyakinan agama mereka sendiri sebagai satu-satunya yang benar atau superior, -dalam kasus ekstrem, bisa mendorong sikap-sikap eksklusif terhadap yang lain. Hal inilah yang menjadikan sikap narsistik menjadi arogan bagi orang lain. Penguatan identitas kolektif yang kuat dalam kelompok dapat menghasilkan isolasionisme atau permusuhan terhadap kelompok-kelompok lain yang dianggap 'lain' atau 'asing' (Lukito, 2012). Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar toleransi yang menekankan pada penerimaan dan penghargaan pada keberagaman sebagai sumber kekayaan sosial dan budaya. Perilaku egoisme kelompok, eksklusivitas, dan sikap arogansi bertentangan dengan nilai-nilai hidup bersama dan dapat mengancam stabilitas sosial (Tarpin, 2022). Oleh karena itu, memahami dinamika sosial dan psikologis dari narsisme agama dapat membantu mendorong sikap yang lebih inklusif dan membentuk umat beragama yang lebih toleran dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kian semakin kompleks dan beragama.

## Implikasi

Penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan literasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan berbasis nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Negara perlu menegaskan perannya sebagai aktor netral yang menjamin keadilan bagi seluruh kelompok agama, serta mencegah dominasi mayoritas dalam ruang publik. Selain itu, media terutama media sosial perlu didorong untuk menjadi ruang dialog yang sehat, bukan arena polarisasi. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya membangun kesadaran kritis dalam mengekspresikan identitas keagamaan di ruang publik, agar agama dapat berfungsi sebagai sumber etika sosial yang memperkuat solidaritas, bukan sebagai alat kontestasi dan disintegrasi sosial.

## Kesimpulan

Fenomena narsisme agama dalam ruang publik di Indonesia menunjukkan pergeseran fungsi ruang publik dari arena diskursus rasional menjadi ruang representasi simbolik yang sarat kepentingan identitas dan dominasi kelompok. Dalam perspektif Jürgen Habermas, kondisi ini mencerminkan terjadinya distorsi komunikasi, di mana ekspresi keagamaan tidak lagi diarahkan pada pembentukan konsensus rasional, melainkan pada penegasan superioritas, pencitraan, dan kontestasi antar kelompok. Narsisme agama hadir baik dalam ruang digital maupun sosial riil, dipengaruhi oleh politik identitas, logika mayoritas, dan warisan konflik keagamaan, sehingga mendorong polarisasi, intoleransi, dan melemahnya kohesi sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merekonstruksi ruang publik sebagai ruang yang inklusif, setara, dan dialogis agar agama dapat kembali berfungsi sebagai sumber nilai yang memperkuat solidaritas sosial, bukan sebagai alat dominasi dan disintegrasi. Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai narsisme agama dengan menggunakan pendekatan empiris yang lebih luas, seperti etnografi digital, maupun studi lapangan pada komunitas keagamaan tertentu di Indonesia.

## Daftar Rujukan

- Abdullah, M. A. (2017). Menengok Kembali Peran Agama Di Ruang Publik. *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, 11(2), 157-184.
- Achmad Muhibin Zuhri. (2021). *Beragama di Ruang Digital: Konfigurasi Ideologi dan Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Virtual* (H. Ikmal (ed.)). Nawa Litera Publishing.
- Ardha, B. (2014). Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 Di Indonesia. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(01), 105-120.
- Arif Firmansyah. (2023). *Bogor Ngaji Al Quran di Alun-Alun Kota Bogor*. Antara.
- Asmaul Husna. (2018). Komodifikasi Agama: Pergeseran Praktik Bisnis dan Kemunculan Kelas Menengah Muslim. *Jurnal Komunikasi Global*, 2, 227-239.
- Budi Kurniawan. (2018). Politisasi Agama di tahun Politik : Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 12(1), 133-154.
- Budiarti, D., & Ardi, R. (2020). Pengaruh Fundamentalisme Agama terhadap Narsisme Kolektif dan Out- Group Derogation pada Aktivitas Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri. *INSAN: Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 4(2), 54-63.  
<https://doi.org/10.20473/jpkm.v4i22019.54-63>
- Campbell, H. (2005). Making Space for Religion in Internet Studies. *The Information Society*, 21(4), 309-3015.
- Cartono, C. (2019). Agama Dan Budaya Populer. *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(1), 22. <https://doi.org/10.24235/orasi.v10i1.5135>
- Coward Harold. (1989). *Pluralisme dan Tantangan Agama*. Kanisius.

- Destarini, F., & Prambudi, B. (2020). Pengaruh Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Pada Konsumen 212 Mart Condet Batu Ampar. *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, 10(1), 58–66. <https://doi.org/10.37932/j.e.v10i1.27>
- Engki Prasutomo, Hengky Wijaya, I. T. J. W. (2019). The Role of Public Sphere According to Jurgen Habermas's Perspective for Multicultural Societies in the Indonesian Context. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 3(2), 79–91. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v3i2.2548>
- Epafras, L., Suleeman, E., & Yasmine, D. (2022). Dinamika Aktivisme Digital Kaum Muda Indonesia dalam Wacana Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB). *Researchgate.Net*, 1(December), 1–19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10428810>
- Firmanda Taufiq; Ayu Maulida Alkholid. (2021). Peran Kementerian Agama dalam Mempromosikan Moderasi Beragama di Era Digital. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41.
- Fransiskus Irwan Widjaja, N. I. B. (2019). *Misi dan Pluralitas Keyakinan di Indonesia*. PBMR ANDI.
- H. M. Ridwan Lubis. (2017). *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial* (Imam Syaukani (ed.); 2nd ed.). KENCANA.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Volume 1: Reason and the Rationalization of Society* (1st ed.). Beacon Press.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Habermas, J. (2010). *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Sebuah Masyarakat Borjuis*. Kreasi wacana.
- Hanafi, I. (2017). Rekonstruksi Makna Toleransi. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.24014/trs.v9i1.4322>
- Haposan Silalahi & Kevin Boris Marbun. (2023). Fenomena Narsis Beragama di Media Sosial: Sebuah Analisis-Reflektif Matius 6:1. *Kurios*, 9, 148–157.
- Hardiman, F. B. (2010). *Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*. Kanisius.
- Haryatmoko. (2010). *Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Dominasi*. Gramedia.
- Hasrullah. (2009). *Dendam Konflik Poso*. Gramedia Pustaka Utama.
- Laurentius Tarpin. (2022). *Cintai dan Lakukanlah Apa Saja! Hakikat, Karakteristik dan Implementasi Cinta* (R. Retno (ed.)). Kanisius.
- Leo Agung Srie Gunawan; Nathanio Chris Maranatha Bangun. (2019). Diskursus Agama dalam Ruang Publik Menurut Jurgen Habermas. *Logos: Jurnal Filsafat-Teologi*, 16(2), 1–25.
- Lockhart, C., Sibley, C. G., & Osborne, D. (2024). Religiosity and Ambivalent Sexism : the Role of Religious Group Narcissism. *Current Psychology*, 43(1), 85–95. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-04243-7>
- Lukito, D. L. (2012). Eksklusivisme, Inklusivisme, Pluralisme, dan Dialog Antar Agama. *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 13(2), 251–279. <https://doi.org/10.36421/veritas.v13i2.269>
- M. Afif Anshori. (2012). Mencari Titik Temu Agama-Agama di Ranah Esoterisme: Upaya Mengatasi Konflik Keagamaan. *Analisis*, 12, 289–314.
- M. Zainul Hasani Syarif. (2019). Relasi Agama & Negara Penguatan Peran Strategis Lembaga Pendidikan dalam Program Harmonisasi-Integrasi Nasional. *AT-Ta'DIB: Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan*, 3(2).
- Madung, O. G. (2011). Relasi Agama dan Moralitas Masyarakat Postsekular Negara: Telaah atas Pemikiran Juergen Habermas. *Millah*, 10(2). <https://doi.org/10.20885/millah.vol10.iss2.art4>
- Maemunah, S., & Muzakki, M. A. (2024). Narcissistic Personality Disorder (Npd) dalam Riwayat Profetik. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 1(1), 33–48.

- <https://doi.org/10.30984/ajip.v9i1.2951>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Juli 2018). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Rijal Fadli. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Paul Budi Kleden. (2010). *Dialektika Sekularisasi*. Lamalera.
- Prasetyo, A. G. (2012). Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik. 16(2), 169–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.10901>
- Rahman, M. T., & Yudaningsih. (2025). Religious Identities and Religious Institutions : Analisis Naratif Identitas Keagamaan dalam Perspektif Sosiologi Agama Nancy T. Ammerman. *Edutech: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(3), 3031–3038. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/e.v24i3.91644>
- Rakhmat, J. (2003). *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar* (I). Mizan.
- Ridwan, M. (2016). Agama; Antara Cita Dan Kritik. *Fikrah*, 4(1), 154. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1612>
- Rizki, M. (2022). *Launching Bogor Mengaji Angkatan Ke-2 Bima Arya: Program Mencari Keberkahan Dalam Ikhtiar Bersama*. TribunnewsBogor.Com.
- Samosir, A. R., Sianturi, R. P., & Kakunsi, E. (2022). Gereja dan krisis kebebasan beragama di Indonesia. *Kurios*, 8(2), 355–369. <https://doi.org/10.30995/kur.v8i2.583>
- Sanjaya, V. F. (2020). Pengaruh Narsisme Dan Moderasi Religiusitas. 3(1), 1–7.
- Sari, E. (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 145–156.
- Silalahi, H., Sibarani, Y., & Marbun, K. B. (2023). Fenomena Narsis Beragama di Media Sosial : *Kurios: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 9(1), 148–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.30995/kur.v9i1.566>
- Sonny Zaluchu, Stephanus Karnadhi, Fransiskus Widjaja, H. S. (2019). Legitimation of Religious Symbols in Politics: Descriptive Analysis of The Narration of Indonesian Election Campaign 2019. *Proceedings of the International Conference of Democratization in Southeast Asia (ICDeSA 2019)*. <https://doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.13>
- Sunartono. (2022). *Pro Kontra Mengaji Massal di Malioboro, Begini Penjelasan Lengkap Penyelenggara*. Harian Jogja.
- Tsuria, R., Yadlin-segal, A., Vitullo, A., & Campbell, H. A. (2017). Approaches to digital methods in studies of digital religion. *The Communication Review*, 20(2), 73–97. <https://doi.org/10.1080/10714421.2017.1304137>
- Weber, M. (2019). *Sosiologi Agama* (Sumarto (ed.); 1st ed.). IRCiSoD.
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya (Religious Conflicts in Indonesia Problems and Solutions to Solve them). *Substantia : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 217–228.
- Zendrato, A. (2024). Penalaran Publik Agama dalam Negara Hukum Demokratis Menurut Jürgen Habermas. *Jurnal Poros Politik*, 6(1), 1–9.